

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa (Aan 2019).

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Republik 2014).

Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen *good governance*. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Rustiarini 2016).

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Terciptanya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam upaya penyelenggaraan negara, pemerintah harus mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Di Indonesia Prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan (Meliani and Maria 2020).

Dalam mendukung majunya sebuah desa pembangunan yang merata sangat dibutuhkan oleh masyarakat, melalui daerah penyangga dan daerah yang

sudah maju. Agar saling membantu pemerataan sebuah desa harus adanya keselarasan antara daerah penyangga harus bekerjasama dengan daerah perkotaan karena potensi dari setiap daerah berbeda-beda hal inilah yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk menggali potensi dari setiap daerah harus adanya pemerataan agar bisa membuat perencanaan di masa yang akan datang (Kaka 2021).

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh seseorang dan konteks sosialnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan yaitu, kredibilitas, kompetensi dan sikap. Untuk mencapai kepercayaan masyarakat maka salah satu cara yang dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Apabila pemerintahan tidak akuntabel dan transparan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan (Norni 2020).

Good governance (tata kelola yang baik) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Cahyadi (2016) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip *good governance*. Upaya pemerintahan desa dalam perbaikan akuntansi dana desa dengan melakukan penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yang diharapkan memenuhi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Apabila aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good*

governance maka pemberian pelayanan publik tersebut sudah maksimal dalam kegiatannya.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengedepankan prinsip keadilan dalam proses pengelolaan dana desa. Serta mampu mengemban amanah dalam melakukan program-program kerja yang ada didesa, mengutamakan kebutuhan warga dengan begitu capaian dari *good governance* tercapai dengan maksimal. Apabila pemerintah desa tidak maksimal dalam pengelolaan dana desa maka masyarakat sebagai obyek dalam pelayanan akan merasa dampak negatif. Maka dari itu kepuasan masyarakat merupakan penilaian yang dapat diukur mengenai *good governance* akuntansi dana desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***Good Governance Akuntansi Dana Desa Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Wiwitan Timur)***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *good governance* akuntansi dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good governance* akuntansi dana

Desa dalam membangun kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang *good governance* akuntansi dana Desa dalam membangun kepercayaan masyarakat pada desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Good governance (tata kelola yang baik) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Adapun prinsip-prinsip *good governance* yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektivitas dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik. Apabila aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan prinsip *good governance* maka pemberian pelayanan publik tersebut sudah maksimal dalam kegiatannya.

Namun karena keterbatasan waktu serta pengetahuan penelitian sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas tentang *good governance* akuntansi dana desa pada pemerintahan desa dalam membangun kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan agen, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain yaitu prinsipal. Prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan third party (Budi santoso, 2015).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai agen (memberi kewenangan) adalah pemerintah desa. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemerintah desa juga dituntut untuk berlaku transparan kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat selaku pihak yang akan ikut dalam menentukan kebijakan desa dapat digambarkan sebagai suatu

hubungan keagenan (*agency relationship*), dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yaitu mengelola keuangan dengan baik dimana pengelolaan yang baik harus mengikutsertakan masyarakat (*principal*) sebagai pengguna informasi keuangan dan penentu kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hubungan keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan masyarakat sebagai objek pelayanan publik sebagai prinsipalnya (Weni 2017).

2.1.1 Dana Desa

Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 17 pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. Seperti

halnya pengalokasiannya, mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni:

1. Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen: a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa. b) Peraturan Daerah mengenai dana desa. c) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni, 40% untuk pencairan tahap 1 yang rencananya dicairkan pada setiap bulan april, 60% untuk pencairan untuk tahap 2 pada setiap setiap bulan september.
2. Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 7 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota. Sepertihalnya dengan pencairan RKUN

ke RKUD, Pencairan dana desa ke rekening desa juga terbagi dua tahap dengan proporsi yang sama yakni 60% untuk tahap I, dan 40 % untuk tahap II.

2.2 Good Governance

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa. *Good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki (Rustiarini 2016).

Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. *Good governance* juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang baik. Adanya keterkaitan antara *good governance* dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Cahyadi 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik terdiri dari :

- a) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d) Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- g) Supremasi Hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Adapun indikator *good governance* yaitu:

1) Transparansi

Transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

3) Efektivitas

Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.

2.3 Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan, sikap dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Ketiganya saling mempengaruhi, yang mana kepercayaan akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap. Sikap seringkali akan membentuk perilaku seseorang.

Beberapa literatur telah mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai berikut kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya sebagaimana yang diutarakan barnes (Norni 2020).

Adapun indikator kepercayaan masyarakat yaitu:

1) *Exhibiting Trust*

Tujuan dilakukannya pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau suatu organisasi.

2) *Achieving Result*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim kepercayaan tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan bertahan perusahaan. Setiap orang dalam organisasi juga harus mampu mempertahankan hasil sesuai dengan komitmen yang telah dijanjikan.

3) *Acting With Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsistensi merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsistensi, yang harus

dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu: 1) Sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui. 2) Perkataan harus sesuai dengan perilaku. 3) Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi. 4) Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu.

2.4 Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Zebua 2018)	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 dalam mewujudkan Good Governance Studi kasus Desa Hilihao Kecamatan Gunung Sitoli	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa(X) Dan Good governance (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah Desa Hilihao sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan good governance
2.	(Wardani and Fauzi 2018)	Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa sewurejo Karanganyar	Penerapan Good Governance (X) Pengelolaan Dana Desa (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.

3.	(Gustia 2021)	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi dalam Pencapaian Good Governance (Studi kasus pada Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung)	Akuntabilitas (X) dan Good Governance (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi, tidak terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan terdapat pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui Transparansi dalam Pencapaian Good Governance di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung
4.	(Astuti 2021)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: studi kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali	Transparansi (X1) Akuntabilitas dana desa (X2) dan Good governance (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dana desa memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan
5.	(Yudastio 2021)	Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan	Good Governance (X) dan Pengelolaan	Penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah

		Keuangan Desa	keuangan Desa (Y)	diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Way Muli dan Desa Batu Balak di Kecamatan Rajabasa. Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan penatausahaan, sampai tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai prinsip good governance.
6.	(Garung and Lomi 2020)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka	Akuntabilitas (X1) Transparansi (X2) Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam

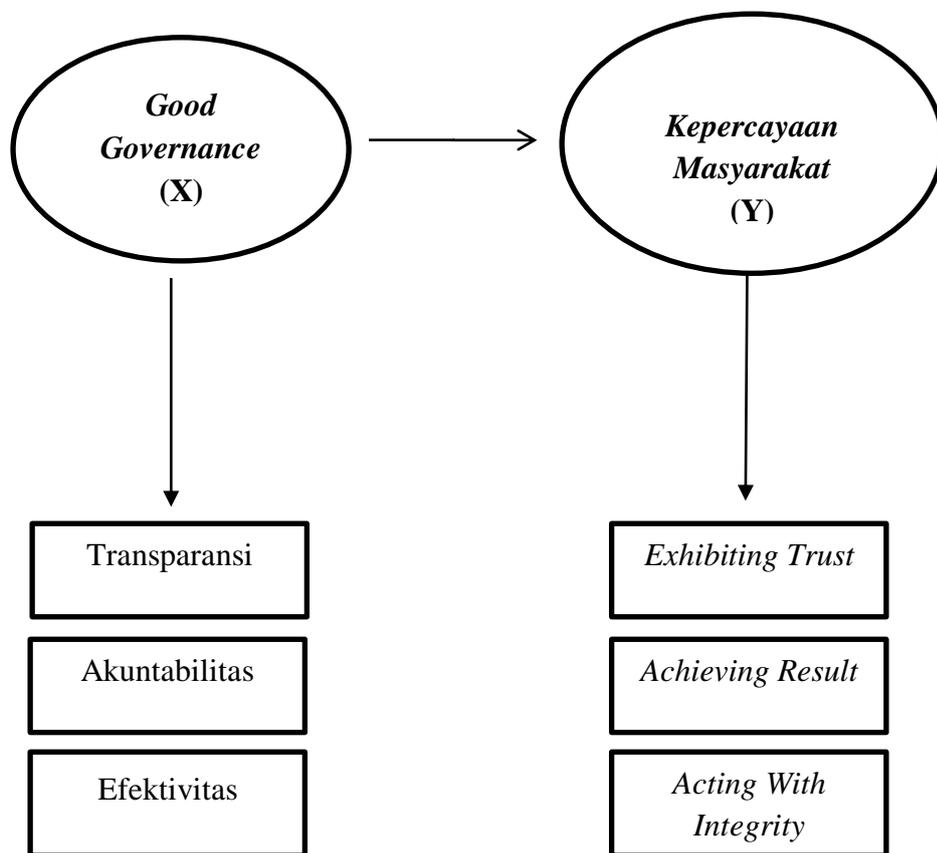
				mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kabupaten Sasitamean, Kabupaten Malaka.
7.	(Meliani and Maria 2020)	Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Good Governance (X) Dan Pengelolaan Dana Desa (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Wlahar Wetan tertib dan tepat waktu dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa baik secara vertikal kepada Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian secara horizontal kepada masyarakat..
8.	(Agus, Afifuddin, and Pindahanto 2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi kasus di Kantor Pemerintahan Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)	Akuntabilitas (X1) Transparansi Pemerintah Desa (X2) danAlokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Y).	Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bendoroto dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahapan awal hingga laporan-laporan pertanggungjawabannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan format dari pemerintah pusat

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang *good governance* akuntansi dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber: (Weni 2017)

Sumber: (Weni 2017)

2.6 Hipotesis

Hipotesis secara sederhana merupakan dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang di peroleh. Menurut (Sugiyono, 2018), hipotesis penelitian adalah jawaban sementara berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang dibuat oleh penulis berbentuk pernyataan, hipotesis yang masih bersifat tentatif perlu diuji kembali melalui serangkaian penelitian.

H_0 : *Good Governance* akuntansi dana desa diduga tidak berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat.

H_1 : *Good governance* akuntansi dana desa di duga berpengaruh dalam membangun kepercayaan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Penelitian kuantitatif menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wiwitan Timur Kecamatan Lamasi. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan Mei sampai pada bulan Juli 2022.

3.3 Populasi dan Sampel

Salah satu bagian dalam desain penelitian adalah menentukan populasi dan sampel penelitian. Penentuan populasi dan sampel penelitian menjadi sangat penting. Karena hasil penelitian akan mengambil kesimpulan secara luas (generalisasi hasil penelitian). Ketepatan dan keakuratan dalam penentuan

populasi dan sampel penelitian akan memberikan bobot dengan kualitas hasil penelitian.

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2018), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa yang berada di Desa Wiwitan Timur yang berjumlah 2.406 jiwa atau 703 kepala keluarga (kk).

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Sugiyono, 2018). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Accidental Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara menyebar sejumlah kuesioner dan menggunakan kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Digunakan rumus ini karena populasi yang didapatkan sebesar 2.406 jiwa atau 703 kepala keluarga (kk).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$
$$= \frac{703}{1 + 703 (0,1)^2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{703}{1 + 703 (0,01)} \\
&= \frac{703}{1 + 7,03} \\
&= \frac{703}{8,03} \\
&= 87,5466 \text{ (dibulatkan)} \\
&= 88
\end{aligned}$$

Berdasarkan rumus tersebut sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 88 kk.

Keterangan :

n = besarnya ukuran sampel

N = besarnya populasi

e = tingkat kesalahan yang ingin diambil sebesar 10%

Maka sampel yang didapatkan dari populasi masyarakat desa yang berada di Desa Wiwitan Timur yang berjumlah 2.406 jiwa atau 703 kartu keluarga (kk) setelah dilakukan perhitungan dengan rumus slovin didapatkan 88 kk sebagai sampel penelitian dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian informasi yang digunakan merupakan informasi yang bersifat kuantitatif sebab dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya.

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden. Kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis. Pilihan jawaban juga telah tersedia, responden memilah jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu. Data primer dalam penelitian ini dari angket atau kuesioner yang dibagikan kepada responden (Sugiyono, 2018).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden yang

fungsinya adalah menggali informasi. Dalam hal ini kuesioner merupakan teknik yang paling banyak memberikan data.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas. Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian.

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas atau Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *good governance* (X).

2. Variabel Terikat atau Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah kepercayaan masyarakat (Y).

3.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
1	<i>Good Governance</i>	<i>Good Governance</i> yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya.	<ul style="list-style-type: none">➤ Transparansi➤ Akuntabilitas➤ Efektivitas	(Weni 2017)
2	Kepercayaan masyarakat	Kepercayaan masyarakat yaitu kemauan untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Exhibiting Trust</i>➤ <i>Achieving Result</i>➤ <i>Acting With Integrity</i>	(Weni 2017)

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

berupa angket atau kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti yang berisi beberapa item pertanyaan tentang persepsi terhadap masalah penelitian. Instrument dalam penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang disajikan sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Sangat Setuju | diberi nilai 5 |
| 2. Setuju | diberi nilai 4 |
| 3. Netral | diberi nilai 3 |
| 4. Tidak Setuju | diberi nilai 2 |
| 5. Sangat Tidak Setuju | diberi nilai 1 |

3.8 Analisis Data

Teknik Analisis data adalah berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2018). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.8.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item masing-masing pertanyaan dengan skor pertanyaan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program *SPSS (Statistical Package for Social Science)*. Pengujian validitas memiliki kriteria jika nilai sig. (2-tailed) pada total skor konstruk $< 0,05$ atau jika r hitung lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 0,05), maka butir pernyataan atau indikator tersebut dikatakan “valid” dan sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat yang bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban dari responden melalui pertanyaan yang diberikan. Dalam pengujian reliabilitas ini, peneliti menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikansi yang digunakan sebesar 0,6 dimana jika nilai nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,6 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Linier Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/*predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/*response* (Y). (Ghozali, 2018).

Adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Dimana:

Y = Kepercayaan Masyarakat

α = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = *Good Governance*

e = *Standart error*

3.8.3 Uji Hipotesis

Uji statistik digunakan untuk melihat ketepatan atau keakuratan dari suatu fungsi atau persamaan untuk menaksir dari data yang kita analisis. Nilai ketepatan ini dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Dapat dilihat dari nilai t hitung, F hitung dan nilai determinasinya. melalui analisis regresi, kemudian diuji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya untuk kemudian diinterpretasikan hasilnya. kemudian pengambilan keputusan atas hipotesis dapat dilihat dari nilai profitabilitas signifikan dari masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi menggunakan SPSS jika angka signifikan $\alpha < (0,05)$ maka dikatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

2. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018).

- a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Wiwitan Timur

Perjalanan (kolonisasi) dari pulau Jawa menuju Sulawesi dengan menggunakan kapal laut dan ketika tiba di pelabuhan palopo sudah di jemput dan disiapkan kendaraan truk open selanjutnya menuju Lamasi sebanyak 252 KK. Dalam perjalanan ke Lamasi melewati hutan belantara yang sekarang Desa Wiwitan. Setelah tiba di Lamasi ditampung di rumah jabatan asisten yang sekarang rumah Dinas Camat.

Asisten Wedana memberi nama WIWITAN yang artinya: wiwit dalam bahasa Jawa artinya awal, mula dan ditambah akhiran an sehingga menjadi wiwitan yang artinya “pertama kali atau permulaan”.

Pertama kali diantar ke lokasi untuk menempati rumah yang telah disediakan dan 1 rumah ditempati sebanyak 12 KK, dan dikepalai oleh 1 orang yang ditugaskan oleh asisten Wedana yang diber nama kepala BEDENG (kelompok) artinya 1 bedeng terdiri dari 12 KK dan 1 orang yang disebut kepala bedeng.

Sebelum membabat hutan setiap KK mendapat bantuan peralatan. Setelah peralatan kerja diterima, mulai membabat hutan sesuai petunjuk dan setiap KK mendapat bagian tanah 0,25 Ha untuk calon perumahan dan untuk pekarangan/kebun.

Jaminan yang diberikan pemerintah per bulan yaitu berupa beras 18 kg per jiwa orang dewasa dan 9 kg untuk anak – anak dan uang sebesar Rp. 50.

Sekitar 3 bulan pembabatan hutan tahap pertama telah selesai dan sudah dibagi sesuai aturan masing – masing mendapat 0,25 Ha, serta bibit – bibit yang diberikan juga sudah ditanam maka mulai memabat hutan bersama – sama tahap ke-2 untuk persawahan yang setiap KK sebanyak 1,3 Ha.

Sekitar 10 bulan bantuan pemerintah dihentikan karena dianggap sudah mampu berusaha secara mandiri. Tiga tahun kemudian pemerintah memeberikan bantuan ternak berupa anak sapi 1 pasang kepada kepala bedeng dan apabila sudah ada hasilnya kepala bedeng wajib mengembalikan 2 ekor anak sapi kepada pemerintah dan selanjutnya anak sapi tersebut diberikan kepada warga yang lain untuk dipelihara dan seterusnya.

Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2008 berdasarkan hasil survey dari pemerintah daerah Kabupaten Luwu, maka Desa Wiwitan layak dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Wiwitan dan Desa Wiwitan Timur.

4.1.2 Letak Dan Luas Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis Desa Wiwitan Timur terletak di Kecamatan Lamasi yang memiliki luas wilayah 178,2389 Ha. Desa Wiwitan Timur berada pada lokasi persawahan seluas 100 Ha dan perkebunan seluas 38,5 Ha. Desa Wiwitan Timur terdiri dari 4 dusun yaitu:

1. Dusun Sentral
2. Dusun Wiwitan Timur
3. Dusun Gerumbul II
4. Dusun Gerumbul Selatan

4.1.3 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu potensi dasar dalam pembangunan suatu wilayah jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dalam pembangunan daerah, namun jumlah penduduk besar tersebut dapat pula memunculkan berbagai masalah – masalah social. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah klasifikasi jumlah penduduk desa berdasarkan jenis kelamin tahun 2022.

Tabel 4.1 klasifikasi penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2022

No	Dusun	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun Sentral	364	339	703
2	Dusun Wiwitan Timur	321	310	631
3	Dusun Gerumbul II	290	250	540
4	Dusun Gerumbul Selatan	276	256	532
Total		1.251	1.155	2.406

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



4.2 Deskripsi Data Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Wiwitan Timur. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada seluruh dusun yang berada di Desa Wiwitan Timur sebanyak 88 eksampler dan diberikan kepada masyarakat Desa Wiwitan Timur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jumlah kuesioner yang di kembalikan dan dapat digunakan sebanyak 80 eksampler.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Pengumpulan Data Primer Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1	Distribusi Kuesioner	88
2	Laki – Laki	34
3	Perempuan	54
2	Kuesioner Kembali	80
3	Kuesioner cacat/tidak kembali	8
4	Kuesioner yang dapat diolah	$80/88 \times 100\% = 0,90$

Sumber: Data Primer yang Diolah (2022)

4.2.1 Uji Validitas

Hasil pengujian validitas instrument pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor masing – masing butir pernyataan skor total yang dapat dilihat pada nilai *person correlation*, apabila koefisien korelasi positif dan lebih besar dari 0,217 maka indicator tersebut dikatakan valid. Berikut disajikan data validitas dari masing- masing variabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas *Good Governance* (X)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan X1	0,503	0,217	Valid
Pernyataan X2	0,632	0,217	Valid
Pernyataan X3	0,596	0,217	Valid
Pernyataan X4	0,547	0,217	Valid
Pernyataan X5	0,537	0,217	Valid
Pernyataan X6	0,635	0,217	Valid
Pernyataan X7	0,595	0,217	Valid
Pernyataan X8	0,631	0,217	Valid
Pernyataan X9	0,636	0,217	Valid

Sumber: Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel *Good Governance* (X), dinyatakan valid karena nilai hitung > dari r tabel pada signifikan 5%.

Tab 4.4 Hasil Uji Validitas Kepercayaan Masyarakat (Y)

Instrumen	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Y1	0,657	0,217	Valid
Pernyataan Y2	0,657	0,217	Valid
Pernyataan Y3	0,617	0,217	Valid
Pernyataan Y4	0,543	0,217	Valid
Pernyataan Y5	0,451	0,217	Valid
Pernyataan Y6	0,563	0,217	Valid
Pernyataan Y7	0,691	0,217	Valid
Pernyataan Y8	0,605	0,217	Valid
Pernyataan Y9	0,604	0,217	Valid
Pernyataan Y10	0,506	0,217	Valid

Sumber: Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam variabel Kepercayaan Masyarakat (Y) dinyatakan valid karena nilai r hitung $>$ dari r tabel pada signifikan 5%.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode *Statistic Cronback Alpha* dengan signifikasi yang digunakan sebesar 0,60 dimana jika nilai *Cronback Alpha* dari suatu tabel lebih besar dari 0,60 maka butir pertanyaan yang diajukan dalam pengukuran instrument tersebut memiliki reliabilitas yang memadai. Sebaliknya, jika nilai *Cronback Alpha* lebih kecil dari 0,60 maka butir pertanyaan tersebut tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Batas Reliabilitas	r_{tabel}	Keterangan
<i>Good Governance (X)</i>	0,763	0,60	0,217	Reliabel
Kepercayaan Masyarakat (Y)	0,786	0,60	0,217	Reliabel

Sumber: data yang diolah di SPSS tahun 2022

Dari tabel 4.5 diatas hasil pengujian reliabilitas menunjukkan *good governance (X)* dan kepercayaan masyarakat (Y), memiliki *Cronbach Alpha* $>$ 0,60 hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

4.2.3 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Metode dari regresi linear sederhana ini dimaksudkan untuk mengetahui besaran tingkat *good governance* dengan kepercayaan masyarakat maka dari itu penelitian menyajikan hasil dari uji regresi linear sederhana berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,835	3,847		6,716	,000
	Good Governance	,453	,102	,449	4,432	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persamaan linear sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$
$$Y = 25,835 + 0,453X + e$$

Dimana pada nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari model regresi tersebut dapat di ambil kesimpulan pada tabel tersebut terdapat nilai konstanta diatas menunjukkan angka 25,835 ini berarti jika variabel *good governance* bernilai nol maka nilai variabel kepercayaan masyarakat 4,432.
2. Variabel *good governance* memiliki koefisien positif sebesar 0,453. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel *good governance*, dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 0,453 atau 45,3%.

4.2.4 Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen (Ghozali, 2018) dimana uji ini dilakukan

untuk mengukur kemampuan variabel independen, yaitu *good governance* (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu kepercayaan masyarakat (Y).

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,449 ^a	,201	,191	3,89581
a. Predictors: (Constant), Good Governance				

Sumber: Data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas dapat dinyatakan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,449. Hal ini membuktikan bahwa *good governance* akuntansi dana desa dalam membangun kepercayaan masyarakat sesuai dengan interval koefisien yaitu uji R *square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan secara simultan variabel *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R *square*. Hasil uji R *square* dapat dilihat pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai R *square* adalah sebesar 0,201. Hal ini berarti bahwa sebesar 20,1% variabel dependen atau kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *good governance*, sedangkan sisanya yaitu sebesar 79,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

2. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada

tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil uji t hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25,835	3,847		6,716	,000
	<i>Good Governance</i>	,453	,102	,449	4,432	,000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: data yang diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil pengujian diatas didapatkan nilai t_{hitung} sebesar $4,432 > t_{tabel}$ 1,990 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat (Y) dan dapat disimpulkan juga bahwa hipotesis ini dapat diterima.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil statistik yang dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan dalam kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur yang ditunjukkan angka signifikan α $0,000 < 0,05$ pada tabel diatas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan diatas maka hipotesis yang diajukan sebelumnya atau H_1 diterima, ini berarti bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.

Adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa menunjukkan pentingnya *good governance* dalam tata kelola keuangan desa. Hasil studi yang

dilakukan (Rustiarini 2016). menyatakan pengelolaan keuangan dengan good governance terbukti telah banyak membawa dampak yang positif bagi tata kelola pemerintahan. Melihat pentingnya penerapan prinsip *good governance* ini menjadikan prinsip *good governance* sebaiknya dapat diaplikasikan di setiap sektor pemerintahan termasuk sektor keuangan publik di tingkat desa dengan memperhatikan agenda kebijakan pemerintah.

Good governance menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan desa seperti adanya kemudahan dalam mengakses rencana dan pengalokasian dana desa sehingga mempercayakan kepemimpinan pemerintahan desa untuk mewakili kepentingan masyarakat terhadap pelaksanaan dan pengelolaan dana desa agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. *Good governance* berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat karena pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat waktu dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat juga menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh yang membutuhkan. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan dana desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa yakni informasi tentang kebijakan desa yang dipasang dipapan pengumuman

di kantor desa, pemasangan baliho APBDes yang ditempatkan di depan kantor Desa dan beberapa tempat tertentu agar seluruh masyarakat dapat melihat dan mudah mengetahui tentang penggunaan seluruh dana desa, penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dan keterbukaan proses pengelolaan dana desa seperti rapat musrenbang.

Akuntabilitas yaitu kinerja aparatur pemerintahan desa dari perencanaan hingga pengawasan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur bisa dikatakan akuntabel karena pemerintah dan aparat Desa sudah mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat yang disampaikan melalui papan informasi maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya yaitu camat kemudian direkomendasikan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Luwu yang dilakukan setiap 4 bulan sekali sesuai dengan perundang – undangan. Tingkat akuntabilitas dan implementasi pengelolaan dana desa mengarahkan aparat desa untuk mengikuti tahapan sistematis dalam pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Efektivitas yaitu proses yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber – sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin. Dengan adanya otonomi daerah maka efektivitas dana desa dapat berjalan dengan baik dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Efektivitas

pengelolaan dana desa di Desa Wiwitan Timur sudah cukup efektif karena dana desa sangat membantu pemerintahan desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa secara khusus terutama pada masalah – masalah yang menghambat proses perubahan masyarakat desa dalam pembangunan nasional. Adapun anggaran dana desa pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.103.219.000 dan perealisasiannya Rp. 1.103.219.000 yang berarti dananya telah habis terpakai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zebua (2018) dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintah Desa Hilihao sudah berjalan cukup maksimal dan mewujudkan *good governance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Garung dan Lomi (2020) dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh signifikan, terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabilitas dan transparansi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai *good governance* dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat, maka dapat diberikan kesimpulan *good governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *good governance* maka akan semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada Desa Wiwitan Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini mendapatkan bahwa *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Wiwitan Timur sudah baik sehingga diharapkan dalam penelitian di desa wiwitan timur bisa lebih meningkatkan *good governance* sehingga kepercayaan masyarakat lebih meningkat lagi.
2. Hendaknya dalam penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali dan mengembangkan runag lingkup penelitian yang tidak diteliti oleh penulis.

DAFTAR RUJUKAN

- Aan, Yulianto. 2019. Good Governance Akuntansi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Dalam Membangun Public Trust; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas PGRI Madiun.
- Agus, riyanto lulut, Afifuddin, and widodo roni Pindahanto.2021. Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance; Universitas Islam Malang.*Jurnal Respon Publik* 15(2).
- Alpionita, Rina. 2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang).Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi.*Jurnal Ilmu Ekonomi* 887–904.
- Astuti, Puji. 2021. Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa; Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia.*Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi Dan Enterpreneurship* 10(2):80–164.
- Budi Santoso. 2015. *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Cahyadi, Arif. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik;*Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2(2).
- Garung, Christa Yunnita, and ga linda Lomi. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea , Kecamatan Sasitamean ;Universitas Nusa Cendana.*Jurnal Akuntansi: Transaparansi Dan Akuntabilitas* 8(1):19–27.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gustia, ningsih reka.2021. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui Transparansi Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Koto Panap Kecamatan Tanah Kampung).*Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 3(11):17–107.
- Kaka, Susana. 2021. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Governance Di Desa Landungsari, Kematan Dau Kabupaten Malang. Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Meliani, Helena, and Elerina Maria.2020. Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Maharani Mufti Rahajeng; Universitas Jenderal Sudirman.*Public Policy and Management Inquiry* 4(2):74–163.
- Norni, Oktavia. 2020. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa

Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. *Pengantar Ilmu Ekonomi* 02.

- Republik, Negara. 2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa." (2).
- Rustiarini, Ni Wayan, and Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2016. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa; Universitas Mahasaraswati Denpasar. *Good Governance Pengelolan Dana Desa* 1–18.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, Marita Kusuma, and Ahmad Shofwan Fauzi. 2018. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Suwerejo Karanganyar; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Sarakarta. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Ekonomi* 11(43):27–108.
- Weni Ultafiah. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
- Yudastio. 2021. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 6(1):77–88.
- Zebua, Giovani Tania. 2018. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2016 Dalam Mewujudkan Good Governance Studi Kasus Desa Hilihao Kecamatan Gunungsitoli; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas* vol.4:9–15.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. 1(1):21-37.